

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, beraktivitas, dan berinteraksi sosial (S. W. Zulfa et al., 2021). Para ahli menekankan bahwa permukiman ideal harus memenuhi standar yang mencakup aspek arsitektur, sosial, dan kebijakan publik. Dari perspektif arsitektur, Sabaruddin (2012) mencatat bahwa hunian ideal harus memenuhi 4K: keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, yang berarti bangunan harus kokoh secara struktural serta dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan jalan. Sementara itu, dari perspektif sosial, permukiman layak dicirikan oleh kepadatan bangunan yang terkendali, kepemilikan lahan yang jelas, dan tersedianya sarana pendidikan serta partisipasi masyarakat yang baik (Fitriani et al., 2025). Namun, kondisi ideal tersebut justru semakin sulit terwujud di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas kota dalam menyediakan infrastruktur perumahan mengakibatkan tekanan terhadap lahan, yang berujung pada tumbuhnya permukiman kumuh di berbagai wilayah perkotaan Indonesia (Malau, 2014; Zubaidah & Kurniawan, 2022). Migrasi dari desa ke kota yang tidak diimbangi ketersediaan perumahan yang layak mendorong masyarakat memilih tinggal di wilayah ilegal yang lambat laun berkembang menjadi kawasan kumuh (Pasya, 2016).

Penghuni kawasan permukiman kumuh umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk mengakses hunian formal (Izzudin & Risyanto, 2014). Kondisi ini mendorong MBR untuk memprioritaskan jarak lokasi hunian terhadap tempat kerja atau sumber penghidupan sebagai pertimbangan utama, karena jarak yang jauh dari tempat kerja secara langsung menambah beban pengeluaran transportasi yang tidak mampu mereka tanggung (Adiyanti & Ikaputra, 2019). Tingkat pendidikan yang rendah

menjadi salah satu karakteristik dominan kelompok ini, di mana sebagian besar penghuni hanya menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah sehingga peluang untuk mengakses pekerjaan di sektor formal menjadi sangat terbatas (Chumairah et al., 2024; Satrio & Sukmawati, 2021). Ketergantungan pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu ini memperdalam kesulitan ekonomi mereka, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus meskipun kota tempat mereka tinggal terus mengalami pertumbuhan ekonomi (Chumairah et al., 2024; Dahiya, 2017). Mereka sering kali merupakan generasi kedua atau ketiga yang telah menetap di kawasan tersebut selama bertahun-tahun, sehingga keputusan untuk tetap tinggal tidak semata-mata didorong oleh keterpaksaan ekonomi, melainkan juga oleh ikatan sosial dan budaya yang telah mengakar kuat (Nawagamuwa & Viking, 2003). Kondisi lingkungan yang tidak layak, mulai dari sanitasi yang buruk hingga minimnya akses air bersih, turut memperparah kerentanan penghuni terhadap berbagai penyakit berbasis lingkungan, menjadikan kawasan kumuh bukan hanya sebagai masalah perumahan semata, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan penghuninya (Davis, 2006; UN-Habitat, 2007). Karakteristik fisik kawasan ini yang ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi dan kondisi bangunan yang buruk semakin menegaskan posisi penghuninya sebagai kelompok rentan yang kerap tidak memiliki akses terhadap hak atas perumahan yang layak (UN-Habitat, 2007).

Fenomena serupa telah terdokumentasi di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, yang menunjukkan realitas sosial yang keras: kawasan padat tidak terencana dengan infrastruktur yang sangat minim dan kondisi hunian yang jauh dari layak. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor informal bergaji rendah seperti buruh pabrik, pedagang kecil, dan pekerja rumah tangga, dengan kondisi sosial-ekonomi yang berada di bawah rata-rata taraf hidup masyarakat Kota Medan (Sirait et al., 2025). Meski demikian, warga bantaran sungai mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan, seperti meninggikan lantai rumah, membangun tanggul sederhana saat banjir, hingga memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupan (Ginting et al., 2019; Sirait et al., 2025). Keputusan untuk tetap menetap di kawasan tersebut didorong oleh ketiadaan pilihan lahan lain dan

minimnya beban biaya, mereka tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan serta dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari (S. Zulfa et al., 2018). Selain faktor ekonomi, ikatan kekerabatan dan solidaritas sosial yang kuat turut mengikat warga pada tempat tinggalnya, membentuk jaringan sosial yang menjadi modal utama kelangsungan hidup mereka (Sirait et al., 2025).

Kondisi yang tidak jauh berbeda ditemukan di bantaran Sungai Bedera, anak sungai Deli yang membentang melintasi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas permukiman liar yang tidak terkendali menyebabkan sungai ini mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi yang terus meningkat (Headlines, 2022). Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memulai program normalisasi Sungai Bedera pada tahun 2022, yang mencakup pembersihan lahan di bantaran sungai sebagai aset negara (Pemerintah Kota Medan, 2022). Namun, program ini menghadapi tantangan sosial yang serius karena banyaknya bangunan permanen dan semi-permanen yang selama ini dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Sumut, 2022). Fenomena pertumbuhan permukiman liar di bantaran Sungai Bedera ini terus meningkat, didorong oleh sebaran lahan yang tidak merata dan lemahnya pengawasan penataan ruang di kawasan tersebut (Batubara, Y.Z., 2024).

Secara fisik, permukiman di bantaran Sungai Bedera tumbuh secara organik tanpa perencanaan formal, ditandai dengan rumah-rumah semi-permanen yang dibangun dari bahan seadanya di atas tanah milik negara atau kawasan yang dilarang untuk dihuni (Arisani et al., 2017; *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011). Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase hampir tidak tersedia, sehingga warga mengandalkan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk mencuci dan buang air besar (S. Zulfa et al., 2018). Kepadatan permukiman yang tinggi dipadukan dengan konstruksi rumah yang rapuh menciptakan kerentanan serius terhadap banjir dan risiko kesehatan lingkungan (Sirait et al., 2025). Warga bertahan dengan mengandalkan biaya hunian yang sangat rendah dan kesediaan untuk hidup dalam keterbatasan ruang sebagai strategi menekan beban biaya perumahan (Ginting et

al., 2019; S. Zulfa et al., 2018). Kondisi ini menggambarkan bagaimana keterbatasan ekonomi secara langsung membentuk wujud fisik permukiman yang tumbuh sebagai respons pragmatis terhadap tekanan urbanisasi, bukan sebagai produk dari perencanaan yang terencana dan terstruktur.

Keberadaan permukiman kumuh di bantaran sungai tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara urbanisasi dan penyediaan perumahan, tetapi juga merupakan indikator kegagalan perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah perkotaan yang berkelanjutan (Siregar, 2019). Keterbatasan lahan perkotaan yang terjangkau, lemahnya penegakan peraturan tata ruang, dan minimnya akses terhadap layanan dasar secara sistematis telah meminggirkan masyarakat miskin ke wilayah yang rentan secara ekologis seperti bantaran sungai (Jones, 2017; UN-Habitat, 2007). Penanganan permukiman kumuh yang tidak berbasis data dan partisipasi masyarakat hanya akan menghasilkan solusi sementara yang cenderung menciptakan ketimpangan baru dalam pembangunan perkotaan (Rahardjo, 2010). Lebih jauh, kawasan bantaran sungai yang dihuni secara informal sering kali diabaikan dalam pengumpulan data resmi, sehingga menciptakan titik buta dalam perencanaan perkotaan yang mengakibatkan lambatnya dan tidak tepatnya intervensi pemerintah (Firman, 2004).

Berbagai penelitian sebelumnya di kawasan bantaran sungai di Kota Medan telah mengkaji aspek sosial-ekonomi penghuni (Ginting et al., 2019; Sirait et al., 2025; S. Zulfa et al., 2018) serta dampak kebijakan normalisasi sungai terhadap permukiman yang ada (Batubara, Y.Z., 2024). Namun, kajian yang secara khusus menelaah fenomena arsitektur, yakni bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung membentuk dan memengaruhi karakteristik fisik hunian yang mereka bangun di bantaran sungai, hingga saat ini masih belum dilakukan. Padahal, pemahaman atas hubungan antara kondisi sosial-ekonomi dan wujud fisik permukiman justru menjadi kunci dalam merancang intervensi yang tidak sekadar bersifat penggusuran, melainkan menghadirkan solusi hunian yang adaptif, kontekstual, dan manusiawi. Terlebih lagi, program normalisasi Sungai Bedera yang telah berjalan sejak tahun 2022 membutuhkan

landasan pemahaman empiris yang mendalam agar tidak menciptakan ketimpangan baru bagi masyarakat yang terdampak (Pemerintah Kota Medan, 2022; Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, penelitian yang sistematis dan berbasis konteks lokal perlu dilakukan untuk memetakan karakteristik fisik permukiman, memahami dinamika sosial-ekonomi penghuninya, serta mengkaji bagaimana arsitektur dapat menjadi alat strategis dalam mendukung transformasi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada “Fenomena Permukiman di Bantaran Sungai Bedera Kota Medan” sebagai upaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian fenomena arsitektur permukiman yang tumbuh secara informal di bantaran Sungai Bedera, dengan memperhatikan hubungan antara kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan wujud fisik hunian yang mereka bangun. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik fisik permukiman yang terbentuk di bantaran Sungai Bedera sebagai wujud fenomena arsitektur masyarakat berpenghasilan rendah?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk menetap dan bertahan tinggal di bantaran Sungai Bedera?
3. Bagaimana hubungan antara kondisi sosial-ekonomi penghuni dengan wujud fisik permukiman yang mereka bangun di bantaran Sungai Bedera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik fisik permukiman yang terbentuk di bantaran Sungai Bedera sebagai wujud fenomena arsitektur masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk menetap dan bertahan tinggal di bantaran Sungai Bedera.
3. Mengkaji hubungan antara kondisi sosial-ekonomi penghuni dengan wujud fisik permukiman yang mereka bangun di bantaran Sungai Bedera sebagai bagian dari fenomena arsitektur permukiman informal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada dua dimensi berikut:

Secara Teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang fenomena arsitektur permukiman informal, khususnya dalam mengkaji bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung membentuk karakteristik fisik hunian yang mereka bangun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fenomenologi arsitektur dalam konteks permukiman bantaran sungai di Indonesia, serta mendorong disiplin ilmu lain untuk turut berkontribusi dalam memahami kompleksitas kehidupan bertinggal masyarakat urban marginal.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam pelaksanaan program normalisasi Sungai Bedera, agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat penertiban fisik tetapi juga mempertimbangkan karakteristik sosial dan pola hunian masyarakat yang terdampak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi arsitek dan perencana kota dalam merancang pendekatan hunian yang adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan nyata masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan bantaran sungai.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pengkajian fenomena arsitektur permukiman yang terbentuk di bantaran Sungai Bedera, tepatnya di Kelurahan Terjun, Kecamatan

Medan Marelan, Kota Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (sebagai variabel bebas) membentuk dan memengaruhi karakteristik fisik permukiman yang mereka bangun (sebagai variabel terikat) sehingga menciptakan fenomena arsitektur yang khas pada kawasan tersebut. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan standar pelayanan minimum infrastruktur, melainkan terbatas pada pengamatan terhadap wujud fisik hunian dan pola permukiman sebagai ekspresi dari cara hidup penghuninya. Subjek penelitian adalah penghuni dewasa yang termasuk dalam kategori *bridgeheader*, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadikan bantaran sungai sebagai pilihan hunian utama. Secara spasial, penelitian dibatasi pada kawasan hunian di bantaran Sungai Bedera yang berjarak kurang dari 20 meter dari bibir sungai dan dapat diakses melalui jalan bantaran di sekitar Jalan Pasar 1 Rel.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian secara logis dan terstruktur, sehingga setiap bagian saling mendukung dan membentuk satu kesatuan argumentasi yang utuh. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang fenomena permukiman informal di bantaran Sungai Bedera sebagai titik awal argumentasi penelitian, mulai dari konteks urbanisasi nasional hingga kondisi spesifik kawasan penelitian. Selanjutnya dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yang menjadi panduan analisis, diikuti oleh tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir yang memetakan alur penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membangun landasan teoretis yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan fenomena di lapangan. Kajian dimulai dari terminologi fenomena arsitektur permukiman bantaran sungai, dilanjutkan dengan teori

fenomenologi arsitektur, konsep *dwelling*, permasalahan permukiman perkotaan, serta karakteristik *bridgeheader* sebagai kerangka untuk memahami profil penghuni. Teori-teori ini secara langsung menjadi alat analisis pada BAB IV.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah. Dipaparkan lokasi penelitian di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, subjek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data melalui observasi langsung pada tiga waktu berbeda (pagi, siang, dan sore hari), serta tahapan penelitian secara keseluruhan. Bab ini menjadi jembatan antara kerangka teoretis di BAB II dan temuan empiris di BAB IV.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

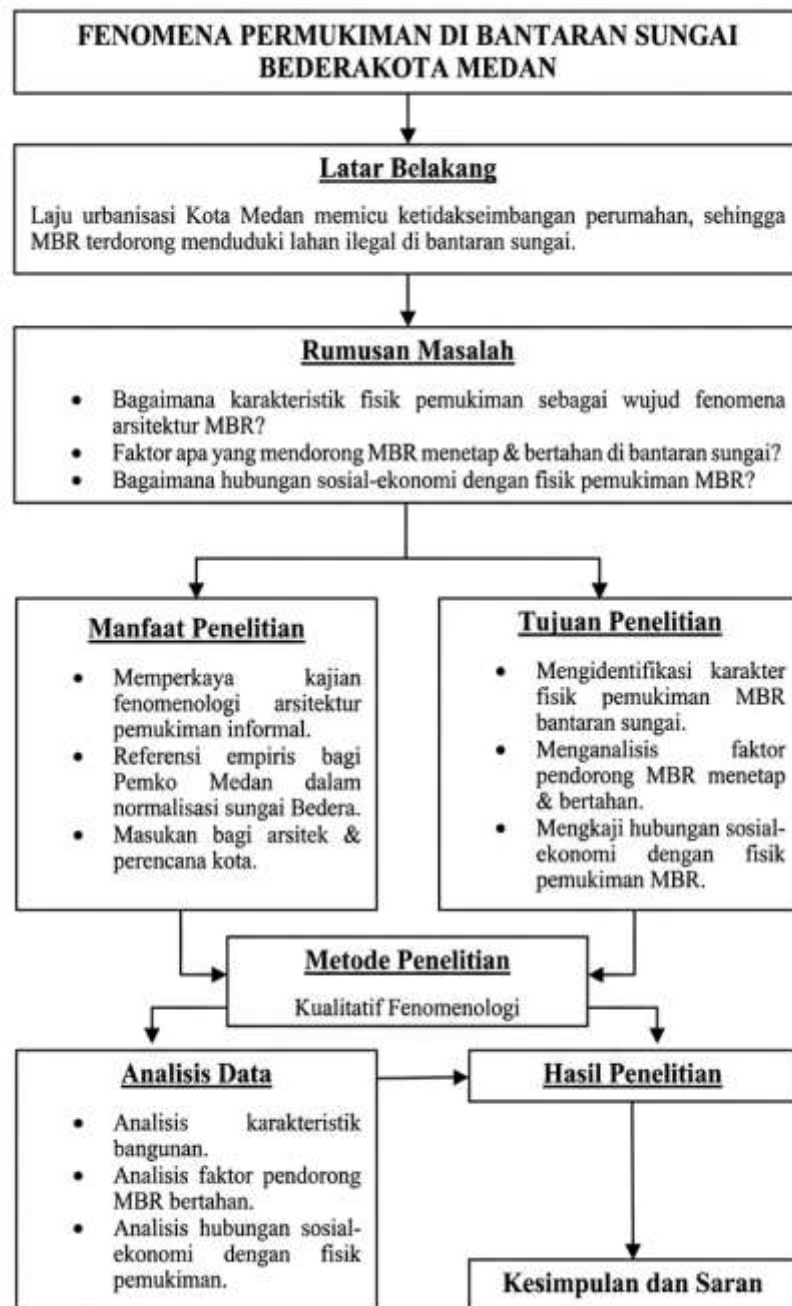
Bab ini menyajikan temuan lapangan dari observasi di bantaran Sungai Bedera dan menganalisisnya menggunakan kerangka teoretis yang telah dibangun di BAB II. Pembahasan mencakup karakteristik fisik permukiman sebagai wujud fenomena arsitektur, faktor-faktor yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah bertahan di kawasan tersebut, serta hubungan antara kondisi sosial-ekonomi penghuni dengan bentuk fisik hunian yang mereka ciptakan. Setiap temuan diinterpretasikan untuk menjawab ketiga rumusan masalah secara sistematis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merumuskan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis di BAB IV yang secara langsung menjawab ketiga rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan di BAB I. Selain itu, dikemukakan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dalam konteks program normalisasi Sungai Bedera, arsitek, dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian fenomena arsitektur permukiman informal di kawasan bantaran sungai.

1.7 Kerangka Berpikir

Berikut ini adalah diagram kerangka berpikir pada penelitian ini, yang memetakan alur hubungan yang dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan dari penelitian ini :



Gambar 1.1 Alur Kerangka Berpikir (Analisa Penulis, 2026)